

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tinjauan Pustaka.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	22
1.5 Manfaat Penelitian.....	22
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.6.1 Tipe Penelitian.....	23
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	23
1.6.3 Bahan Hukum.....	24
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	24
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	24
1.7 Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN</b>	
<b>LINGKAR TIMUR TERHADAP TANAH BEKAS MILIK ADAT .....</b>	<b>27</b>

2.1.	Tinjauan Umum Tanah Bekas Milik Adat.....	27
2.1.1.	Tanah Bekas Milik Adat Setelah Berlakunya UUPA.....	28
2.1.2.	Macam-Macam Tanah Bekas Milik Adat.....	29
2.2.1.	Tanah Yasan.....	29
2.2.2.	Tanah Bengkok.....	31
2.2.	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	32
2.2.1.	Latar Belakang Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	33
2.2.2.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.....	34
2.2.3.	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.....	35
2.2.4.	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.....	38
2.2.5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.....	41

2.2.6.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.....	49
2.2.7.	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.....	50
2.2.8.	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.....	51
2.2.9.	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.....	52
2.3.	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten Lumajang Terhadap Tanah Bekas Milik Adat.....	52

### **BAB III PENYELESAIAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH BEKAS MILIK ADAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR....62**

3.1.	Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi Tanah Bekas Milik Adat.....	62
3.1.1.	Ganti Rugi Terhadap Tanah Yasan.....	69
3.1.2.	Ganti Rugi Terhadap Tanah Bekas Milik Adat.....	71
3.2.	Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah.....	76

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
4.1. Kesimpulan.....	81
4.2. Saran.....	82
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>



## DAFTAR BACAAN

### Buku :

- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Cet.II, UB Press, Malang
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet.VIII, (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Kitay, Michael G., dalam oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Muhamad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Ramelan, Eman, *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014
- Salindeko, John, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1994
- Soetiknjo, Imam, *Proses Terjadinya UUPA (Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gajah Mada)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi&Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , *Tinjauan Hukum Pertanahan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Wignjodipuro, Suryo, *Pengantar & Asas Hukum Adat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990
- Zakie, Mukmin, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum Di Indonesia Dan Malaysia*, Litera, Yogyakarta, 2003.

### **Majalah/Koran :**

Hajati, Sri, “Beberapa Catatan Mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005”, *Majalah Yuridika*, Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 20, No.5, September-Oktober 2005

Ramelan, Eman, Keberadaan Tanah Bengkok Atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Yuridika*, Volume 14, Maret-April 1999

Sumardjono, Maria S.W. Sumardjono, Perpres No. 65 2006, Apa Yang Berubah?, *Kompas*, Rabu 21 Juni 2006

Wardani, Widyarini Indriasti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 10, No.2, April 2013

### **Makalah/Disertasi :**

Harsono, Boedi, “*Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan Nasional*”, Dalam BF Sihombing, Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta), **Disertasi**, Univeristas Indonesia, Jakarta, 2004

Tumpa, Harifin A., “*Bunga Rampai*”, **Makalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia**, 2004

### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2006

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 1993

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2005

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2006
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2012
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2014
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 223 tahun 2014
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2015
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 1994
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Seri E tahun 2006
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/110/427.12/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Lumajang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Keputusan Bupati Lumajang Nomor 460.2.35.29-01/I-NF.1.S/2007 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang Tahun 2007
- Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Jalan Lintas Timur Di Kabupaten Lumajang
- Surat Perintah Kerja Nomor :SPRIN /01/I/2007
- Laporan Peneliti Lapang Dalam Rangka Pertimbangan Persetujuan Penetapan Lokasi
- Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/110/427.12/2007 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Lumajang
- Berita Acara Penyuluhan Nomor PPT/06/2007
- Berita Acara Penyuluhan Nomor PPT/07/2007
- Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kabupaten Lumajang Nomor PPT/07/2007 Tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan, Tanaman Dan Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Sesuai Hasil Musyawarah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Kegiatan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang Di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beserta Lampiran
- Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kabupaten Lumajang Nomor PPT/09/2007 Tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan, Tanaman Dan Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Sesuai Hasil Musyawarah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Kegiatan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang Di Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang beserta Lampiran
- Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah Nomor PPT/07/2007
- Berita Acara Pengadaan Tanah Nomor PPT/07/2007
- Berita Acara Pengadaan Tanah Nomor PPT/08/2007
- Daftar Lampiran Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Nomor PPT/08/2007



- Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
- Keputusan Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/18/427.17/2007 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2007
- Peraturan Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur
- Keputusan Bersama BPD Selokgondang Kepala Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Desa Selokgondang Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur
- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono
- Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
- Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tentang Persetujuan Bersama BPD Selokgondang Dengan Kepala Desa Selokgondang Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Selokgondang Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur
- Peraturan Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur
- Keputusan Bersama BPD Sumberejo Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sumberejo Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur

- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono
- Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
- Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tentang Persetujuan Bersama BPD Sumberejo Dengan Kepala Desa Sumberejo Tentang Persetujuan Mengenai Penyerahan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sumberejo Untuk Pembangunan Jalan Lintas Timur

